

**PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH DI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Ahmad Wahyudi

NPP. 32.0814

*Asdaf Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [ahmadwahyudiw249@gmail.com](mailto:ahmadwahyudiw249@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Yetty Sembiring, S.STP, MM

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *This research is motivated by the persistent occurrence of financial misuse cases in Bitung City and the suboptimal implementation of non-cash transactions within the regional apparatus of Bitung City Government. Non-cash transactions are believed to enhance transparency and accountability in regional financial management, but various technical and structural challenges remain in practice. Purpose: this study is to determine the influence of non-cash transactions on the accountability of regional financial management within local government agencies in Bitung City, North Sulawesi Province. Method: This study uses a quantitative method with an explanatory approach. Primary data were collected through closed-ended questionnaires distributed to 50 respondents consisting of expenditure treasurers and heads of financial sub-divisions in regional agencies. The sampling technique used was simple random sampling, and the data were analyzed using SPSS version 26.0. Result: The research findings show that  $H_0$  is rejected and  $H_1$  is accepted, indicating a significant influence of non-cash transactions on regional financial management accountability. The  $t$ -count value of 13.842 is greater than the  $t$ -table value of 1.67793, with a significance level of  $0.000 < 0.05$ . The Adjusted R Square value of 0.795 or 79% reflects a strong relationship between the variables. Conclusion: Based on the analysis, non-cash transactions significantly affect the accountability of regional financial management. A well-implemented non-cash transaction system can strengthen transparent and efficient financial accountability mechanisms within local governments.*

**Keywords:** *Non-Cash Transactions, Accountability, Financial Management*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kasus penyalahgunaan keuangan di kota bitung dan belum optimalnya penerapan transaksi non tunai di lingkungan perangkat daerah Pemerintah Kota Bitung. Transaksi non tunai diyakini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala teknis dan struktural. **Tujuan:** penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transaksi non tunai terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada perangkat daerah di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada 50 responden yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran dan Kepala Subbagian Keuangan di perangkat daerah, dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 26.0. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Nilai thitung sebesar 13,842 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,67793 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Nilai Adjusted R Square sebesar 0,795 atau 79% menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua variabel. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis, transaksi non tunai memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Implementasi transaksi non tunai yang baik dapat memperkuat mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan efisien di lingkungan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Transaksi Non Tunai, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Konsep good governance menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan publik. Namun demikian, praktik penyalahgunaan anggaran masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data Indonesia Corruption Watch mencatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka sepanjang tahun 2023, menunjukkan bahwa sistem pengawasan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, belum berjalan secara optimal (ICW, 2024).

Untuk mempersempit celah penyimpangan, Pemerintah Pusat menerbitkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Surat Edaran Mendagri No. 910/1867/SJ Tahun 2017, yang mewajibkan percepatan implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) pada semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah paling lambat 1 Januari 2018 (Mendagri, 2017). Kebijakan ini menegaskan peran strategis TNT dalam membangun sistem keuangan daerah yang efisien, terbuka, dan minim risiko manipulasi manual.

Selain regulasi, Bank Indonesia menginisiasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sejak 14 Agustus 2014 untuk mendorong masyarakat dan instansi pemerintah beralih ke pembayaran digital demi keamanan dan efisiensi sistem pembayaran nasional (Bank Indonesia, 2014). Dengan pencatatan real-time dan bukti elektronik yang sah, TNT mempersempit ruang terjadinya rekayasa atau penyimpangan data keuangan.

Berbagai studi empiris mendukung efektivitas TNT. Gunawan, Fatikasari, dan Putri (2023) menegaskan bahwa penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas di pemerintah daerah. Uña et al. (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran publik, termasuk melalui fintech, memperkuat transparansi fiskal dan mengurangi risiko penyimpangan anggaran. Sementara itu, Awudu (2023) menemukan bahwa implementasi Integrated Financial Management Information System (IFMIS) berdampak langsung pada peningkatan financial accountability di tingkat lokal, terutama jika didukung literasi digital dan kontrol internal yang memadai.

Di Kota Bitung, TNT telah diterapkan sejak 2018 melalui Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD). Namun menurut Utomo, Tumija, dan Pangemanan (2021) mengungkapkan bahwa

efektivitas SIPD masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur digital dan kompetensi aparatur, khususnya di kecamatan dengan jaringan internet belum merata. Marta, Sembiring, dan Ilham (2024) menekankan bahwa pendekatan smart governance melalui integrasi sistem TNT dengan kebijakan pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan transformasi digital di pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Transaksi Non Tunai (TNT) memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada perangkat daerah di Kota Bitung, dengan harapan hasilnya dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan kebijakan tata kelola keuangan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP PENELITIAN)**

Meskipun banyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti temuan Yudhanti (2018) mengenai peningkatan akuntabilitas manajerial melalui pencatatan real-time, serta studi Ardinah, Maryadi, dan Sjarlis (2021) yang menekankan peran integritas dan kompetensi SDM namun penelitian tersebut dilaksanakan di tingkat provinsi atau kabupaten lain (Yudhanti, 2018; Ardinah et al., 2021).

Hingga saat ini, belum ada kajian empiris yang secara khusus mengevaluasi pengaruh transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kota Bitung, yang memiliki karakteristik infrastruktur digital dan tingkat literasi aparatur yang berbeda dari daerah lain. Selain itu, sebagian besar studi terdahulu hanya menitikberatkan pada aspek teknis sistem, sedangkan peran kepemimpinan, budaya organisasi, dan kebiasaan masyarakat terhadap efektivitas TNT belum banyak dieksplorasi (Ardinah et al., 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan meneliti secara komprehensif bagaimana penerapan transaksi non tunai memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Bitung, termasuk faktor-faktor pendukung nonteknis yang selama ini kurang mendapat perhatian.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah kajian terdahulu yang menyoroti peran transaksi non tunai dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Haryono (2010) mengungkap bahwa penggunaan bukti transaksi perbankan secara real-time di Kabupaten Landak berhasil menekan peluang penyelewengan anggaran. Selanjutnya, Dona dan Khaidir (2019) yang melakukan studi kualitatif di Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan bahwa meski infrastruktur dan mekanisme online telah tersedia, efektivitas sistem tetap terkendala oleh rendahnya kompetensi aparatur dan belum seragamnya prosedur. Penelitian kuantitatif Yudhanti (2018) mempertegas bahwa semakin tinggi tingkat adopsi sistem non tunai, semakin baik akuntabilitas bendahara dan kinerja manajerial, sementara Sandyasmoro (2021) menambahkan bahwa dimensi disposisi pegawai dan struktur birokrasi memegang peran kunci dalam mencegah fraud di Pemerintah Kabupaten Magetan. Di sisi lain, Zeyn (2011) menegaskan pentingnya standar akuntansi pemerintah dalam mengokohkan akuntabilitas keuangan, meski penerapan prinsip good governance perlu dukungan faktor lain agar optimal. Meskipun hasil studi-studi tersebut menunjukkan manfaat nyata transaksi non tunai, belum ada penelitian yang secara khusus mengukur efektivitasnya dalam konteks spesifik Pemerintah Kota Bitung dengan tantangan kesiapan SDM, merata atau tidaknya

infrastruktur jaringan, dan integrasi antar-sistem. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengintegrasikan tiga aspek kontekstual—kesiapan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur jaringan, dan integrasi antar-aplikasi keuangan—yang belum dijadikan variabel moderasi dalam studi-studi sebelumnya. Yudhanti (2018) dan Sandyasmoro (2021) telah membuktikan bahwa transaksi non tunai meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi fraud, namun keduanya tidak mempertimbangkan kesiapan teknologi aparatur. Dona & Khaidir (2019) serta Haryono (2010) menegaskan pentingnya infrastruktur dan real-time banking, tetapi fokus mereka terbatas pada deskripsi implementasi, bukan pada pengukuran dampak moderasi teknis. Melengkapi gap tersebut, penelitian ini menggunakan data primer terkini (2024–2025) dan pendekatan explanatory quantitative dengan SPSS 26.0 untuk menguji seberapa besar kontribusi transaksi non tunai—dengan mempertimbangkan variabel-variabel teknis—dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah di Kota Bitung, sehingga hasilnya lebih aplikatif bagi kebijakan e-transaksi daerah.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada perangkat daerah di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory dengan analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh Transaksi Non Tunai (X) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang disebarlang langsung kepada seluruh bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan kepala sub-bagian keuangan di 24 dinas, 6 badan, serta 8 kecamatan di Kota Bitung. Populasi penelitian berjumlah 80 orang, namun untuk keperluan analisis dipilih 50 responden menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kelonggaran 10% (Sugiyono, 2019) dan teknik simple random sampling, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan SPSS versi 26.0. Pertama dilakukan uji instrumen berupa validitas dan reliabilitas untuk memastikan kuesioner mampu mengukur variabel secara tepat. Selanjutnya dilakukan uji normalitas Kolmogorov–Smirnov pada residual untuk memverifikasi asumsi distribusi data. Analisis dilanjutkan dengan regresi linear sederhana, yang menghasilkan koefisien determinasi (Adjusted R Square) untuk melihat besarnya kontribusi transaksi non tunai terhadap akuntabilitas, dan uji hipotesis t-test untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Keseluruhan proses penelitian ini berlangsung selama satu minggu, mencakup pendistribusian kuesioner, pengolahan data, hingga interpretasi hasil.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Uji Instrumen Penelitian

##### 3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas instrumen dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan benar-benar sesuai dan mampu mengukur data yang dibutuhkan dari para responden dalam penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menjumlahkan skor dari masing-masing pernyataan. Untuk dapat mengetahui hasil uji validitas dilakukan analisis dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan tabel nilai r yang terdapat di lampiran, dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang dengan taraf signifikansi 0,05, maka dapat diketahui nilai r tabel sebesar 0.294.

Tabel 3.1

Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Status
1	2	3	4
<b>Transaksi Non Tunai</b>			
X1	0,535	0,294	Valid
X2	0,671		Valid
X3	0,505		Valid
X4	0,744		Valid
X5	0,589		Valid
X6	0,686		Valid
X7	0,669		Valid
X8	0,478		Valid
X9	0,843		Valid
X10	0,740		Valid
X11	0,669		Valid
X12	0,668		Valid
X13	0,757		Valid
X14	0,811		Valid
X15	0,672		Valid
X16	0,741		Valid
X17	0,697		Valid
X18	0,769		Valid
X19	0,735		Valid
X20	0,715		Valid
<b>Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah</b>			
Y1	0,781	0,294	Valid
Y2	0,707		Valid
Y3	0,775		Valid
Y4	0,725		Valid
Y5	0,686		Valid

Y6	0,674	Valid
Y7	0,818	Valid
Y8	0,859	Valid
Y9	0,890	Valid
Y10	0,643	Valid
Y11	0,775	Valid
Y12	0,824	Valid
Y13	0,828	Valid
Y14	0,817	Valid
Y15	0,882	Valid
Y16	0,877	Valid
Y17	0,776	Valid
Y18	0,654	Valid
Y19	0,714	Valid
Y20	0,754	Valid

Berdasarkan tabel 3.1 menunjukkan bahwa setiap indikator pernyataan baik dari variabel X maupun variabel Y dikatakan valid yang dan dapat mewakili penelitian ini, karena masing masing indikator memiliki nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$

### 3.1.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana kuesioner yang digunakan memiliki tingkat konsistensi, yakni apakah pernyataan di dalamnya akan menghasilkan jawaban yang sama jika diuji secara berulang.

Tabel 3.2  
Hasil Uji Reabilitas Variabel X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,936	20

Tabel 3.3  
Hasil Uji Reabilitas Variabel Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,963	20

Uji reliabilitas menggunakan Teknik Cronbach's Alpha dengan ketentuan dikatakan variabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 Tabel 3.2 dan 3.3 dapat dilihat bahwa variabel X dan Y dapat dinyatakan reliabel

### 3.2. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menerapkan uji normalitas sebagai bagian dari uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Peneliti menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan memperhatikan nilai residual. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dianggap memiliki distribusi normal.

Tabel 3.4  
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,17047244
Most Extreme Differences	Absolute	,154
	Positive	,119
	Negative	-,154
Test Statistic		,154
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Tabel 3.4 menunjukkan nilai signifikansi sebesar lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

### 3.3. Regresi Linear Sederhana

Regresi linear merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan dasar pengambilan keputusan terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 3.5  
Hasil Regresi Linear Sederhana

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2252,838	1	2252,838	57,961	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1865,662	48	38,868		
	Total	4118,500	49			
a. Dependent Variable: TotalY						
b. Predictors: (Constant), TotalX						

Berdasarkan tabel 3.5 tingkat signifikansi 0,000 yang berarti nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain bahwa Transaksi Non Tunai berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 3.4. Koefisien Determinasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kategori kekuatan antara dua variabel dengan melihat nilai R<sup>2</sup>. Pada tabel 3.6 menjelaskan bahwa nilai pada Adjusted R square sebesar 0,795 yang artinya Pengaruh Transaksi Non Tunai (X) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 79,5% dan berada pada kategori kuat karena lebih dari 0,67 menurut Perdian (2017).

Tabel 3. 6  
Koefisien Dererminasi (R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,894 <sup>a</sup>	,800	,795	3,42893
a. Predictors: (Constant), TotalX				

### 3.5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang telah diajukan, serta mempermudah dalam pengambilan keputusan hasil penelitian. Karena pada penelitian hanya terdapat dua variabel maka pengujian hipotesis cukup menggunakan uji T.

Tabel 3.7  
Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,226	4,855		3,754	,000
	TotalX	,775	,056	,894	13,842	,000

a. Dependent Variable: totalvariabelY

Tabel 3.7 diketahui nilai t 13.842, maka dapat disimpulkan bahwa 13.842 lebih besar dari 1.67793 dimana terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima sedangkan H0 ditolak.

### 3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini konsisten dengan temuan Yudhanti (2018) yang menyatakan bahwa sistem transaksi non tunai

mampu meningkatkan akuntabilitas manajerial melalui pencatatan yang lebih akurat, cepat, dan transparan. Sistem ini mengurangi peluang terjadinya manipulasi data dan meningkatkan efisiensi dalam pelaporan keuangan.

Selain itu, penelitian ini juga selaras dengan studi Ardinah, Maryadi, dan Sjarlis (2021) yang menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh implementasi transaksi non tunai, tetapi juga oleh integritas dan kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya. Berbeda dengan penelitian mereka yang dilakukan pada tingkat provinsi, penelitian ini menunjukkan bagaimana faktor-faktor tersebut juga berperan penting pada level pemerintah kabupaten/kota, khususnya di Kota Bitung. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa teknologi digital dalam sistem keuangan perlu diimbangi dengan kesiapan SDM, kepemimpinan yang kuat, serta budaya organisasi yang mendukung transparansi dan pertanggungjawaban.

### **3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis melihat Selain membuktikan adanya pengaruh signifikan antara transaksi non tunai dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penelitian ini menemukan bahwa tingkat pemahaman dan penguasaan teknis aparatur terhadap sistem transaksi digital masih bervariasi. Beberapa perangkat daerah menunjukkan implementasi yang lebih optimal karena dukungan kepemimpinan dan inisiatif internal, sementara lainnya masih terbatas pada pemenuhan administratif.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa transaksi non tunai memberikan efek positif terhadap budaya kerja, seperti meningkatnya rasa tanggung jawab karena setiap transaksi tercatat dan mudah diaudit. Hal ini memperkuat gagasan bahwa efektivitas sistem digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, kepemimpinan yang mendorong perubahan, dan adaptasi budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel.

## **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi non tunai memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Bitung. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil uji t yang menunjukkan nilai thitung sebesar 13,842 lebih besar dari ttabel sebesar 1,67793, dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berada jauh di bawah ambang batas 0,05. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan transaksi non tunai dengan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square yang mencapai 0,795 atau setara dengan 79,5%. Nilai tersebut berada di atas angka 0,67 yang menunjukkan kategori pengaruh yang sangat kuat. Dengan demikian, semakin optimal pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan perangkat daerah, maka semakin tinggi pula akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang dapat diwujudkan.

**Keterbatasan Penelitian:** Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, terutama yang

berkaitan dengan durasi pelaksanaan penelitian serta keterbatasan peneliti dalam mengembangkan variabel yang diteliti.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan mempertimbangkan berbagai variabel tambahan, seperti gender, usia, jabatan, dan faktor relevan lainnya, guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan optimal.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si., selaku . Rektor IPDN, atas dukungan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak selaku Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Bapak Dr. Marja Sinurat, M.M., selaku Ketua Program Studi Keuangan Publik, atas fasilitas dan bimbingan akademik selama penelitian ini.

Terima kasih yang tulus juga ditujukan kepada Dosen Pembimbing, Ibu Yetty Sembiring S.STP, MM, atas arahan dan ilmu yang diberikan. Penghargaan khusus disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung serta seluruh Perangkat Daerah Kota Bitung beserta jajaran atas izin dan dukungan selama pengumpulan data. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Awudu, A. (2023). Factors influencing financial transparency and accountability in local government: Evidence from IFMIS implementation in Ghana. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/10.17509/aset.v22i1.74873>
- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Kelompok Gramedia.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, A., Fatikasari, A. F., & Putri, S. A. (2023). The effect of using cashless (QRIS) on daily payment transactions using the technology acceptance model. *Procedia Computer Science*, 227, 548–556. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.557>
- Marta, F. Y. D., Sembiring, Y., & Ilham, R. (2024). Sosialisasi penerapan smart city (smart economy) untuk penguatan ekonomi lokal dalam mendukung upaya strategis pemerintah Kota Padang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 10508–10513.
- Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Sandyasmoro, T. O. (2021). Hubungan Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai dengan Frauddan Kinerja Bendahara (Perspesi Bendahara Pengeluaran di Pemerintah KabupatenMagetan). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 7(2), 149–157.
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta. <https://doi.org/978-602-7825-08-6>
- Sugiyono . (2012) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uña, G., Verma, A., Bazarbash, M., & Griffin, N. N. (2023). *Fintech payments in public financial management: Benefits and risks* (IMF Working Paper No. 23/20). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9798400232213.001>
- Utomo, D. D., Tumija, T., & Pangemanan, A. (2021). Pelaksanaan sistem informasi manajemen daerah dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 8(2), 74–101.
- Widiyaningrum, R., & Rosmiati, M. (2020). Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 1042–1047.
- Yudhanti, A. L. (2018). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Akuntabilitas Kinerja Manajerial. *Behavioral Accounting Journal*, 1(2), 132–146. <https://doi.org/10.33005/baj.v1i2.26>
- Zahra, R. (2024). Pengaruh Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Etpd) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Sebagai Upaya Untuk Mengukur Tingkat Literasi Keuangan Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(1), 119–138. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology>
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan. *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 1–14.